



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **BAHAR, ST, MT**

Jabatan : **KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT**

WILAYAH V PROVINSI JAMBI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. BUDI SETIYADI, SH, M.Si**

Jabatan : **DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Drs. Budi Setiyadi, SH, M.Si

Bahar, ST, MT

Pembina Tk. I – (IV/b)
NIP. 19711007 199803 1 008

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH V
PROVINSI JAMBI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi	1. Presentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan	Persen	100
		2. Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subsidi angkutan antar moda	Lokasi	5
		3. Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	4
		4. Jumlah Penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi	-
		5. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan	Persen	100
		6. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi	Lokasi	7
2	Meningkatnya pelayanan transportasi darat	7. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Terminal Tipe A	Persen	80
		8. Persentase penerapan SMART Terminal Tipe A	Persen	-
		9. Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP	Persen	100
3.	Meningkatnya keselamatan transportasi darat	10. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	Persen	70
		11. Persentase pelanggaran pada UPPKB Ditjen Perhubungan Darat	Persen	2
		12. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan Zoss, RASS dan batas kecepatan	Lokasi	38

		13. Jumlah ketersediaan taman edukatif	Lokasi	-
		14. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan	Orang	750
		15. Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)	Unit	-
		16. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	Persen	60
		17. Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan pelayaran alur pelayaran SDP	Unit	-
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	18. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai	85
5.	Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat akuntabel	19. Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat	Nilai	85

Kegiatan

Anggaran

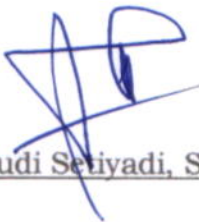
- | | |
|---|----------------------|
| 1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat | Rp. 25.765.289.000,- |
| 2. Pelayanan Transportasi Darat | Rp. 16.622.939.000,- |
| 3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat | Rp. 31.000.850.000,- |
| 4. Penunjang Teknis Transportasi Darat | Rp. 2.275.515.000,- |
| 5. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat | Rp. 8.433.774.000,- |
| 6. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat | Rp. 15.667.501.000,- |

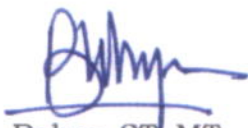
Disetujui

Jakarta, Desember 2021

Direktur Jenderal Perhubungan Darat,

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Wilayah V Provinsi Jambi,


Drs. Budi Setiyadi, SH, M.Si


Bahar, ST, MT

Pembina Tk. I – (IV/b)
NIP. 19711007 199803 1 008